

EKONOMI LOKAL SEBAGAI BAGIAN DARI PENGEMBANGAN WILAYAH PERTAMBANGAN YANG BERDAMPAK TERHADAP PENDAPATAN DAERAH (STUDI KASUS PERTAMBANGAN PASIR DAN BATUAN KAB. BANDUNG BARAT)

¹Sri Widayati, ²Dudi Nasrudin Usman, dan ³Sriyanti

^{1,2, dan 3} Prodi Teknik Pertambangan, Universitas Islam Bandung, Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116

e-mail: ¹widayati_teknik@yahoo.com, ²dudinasrudinmining@gmail.com, ³sriyanti.tambang@yahoo.com

Abstrak. Pembangunan industri berbasis sumber daya alam seperti pertambangan memerlukan keterkaitan yang jelas dari sisi hulu maupun hilir. Hal ini penting dilakukan bagi keberlanjutan ekonomi maupun sosial bagi masyarakat sekitarnya. Kabupaten Bandung Barat memiliki industri pertambangan khususnya bahan galian berupa batuan (batuan andesit, pasir dan lainnya). Adanya aktivitas pertambangan tersebut, secara otomatis memberikan dampak signifikan terhadap masyarakat di lokasi penambangan maupun pemerintahan daerah, salah satu hal dampak adanya aktivitas tersebut yaitu perekonomian lokal dan pajak.

Saat ini, pendapatan asli daerah (PAD) dihasilkan tidak berdasarkan teknis produksi yang dihasilkan, namun lebih ke target yang diinginkan dari pihak pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan PAD-nya, sehingga ada komunikasi terputus antara aspek teknis dan ekonomis, yang apabila terkoneksi dengan baik maka akan mampu memaksimalkan PAD. Metoda yang digunakan untuk memahami permasalahan diatas yaitu kunjungan perusahaan, diskusi, penyebaran kuesioner dan literatur dari SKPD terkait di Kab. Bandung Barat.

Hasil kegiatan menunjukkan 83% lingkungan masyarakat sekitar lokasi pertambangan mengalami peningkatan, besaran nilai ekonomi yang diberikan perusahaan untuk masyarakat dirata-ratakan berkisar antara 5.000.000 – 15.000.000 per bulan, tenaga kerja lokal yang diberdaya 95% dari 17 perusahaan yang disurvei. Sehingga pengembangan ekonomi lokal dengan adanya pertambangan batuan dan pasir di Kab. Bandung Barat sangat memberikan dampak yang positif.

Kata kunci: Ekonomi Lokal, Pengembangan Wilayah, dan Pendapatan Asli Daerah

1. Pendahuluan

Memang tak dapat dipungkiri bahwa Industri Pertambangan memberikan kontribusi cukup besar dalam peningkatan pendapatan daerah, namun tak perlu ditutupi pula kegiatan industri pertambangan merusak lingkungan, terutama dengan adanya perubahan topografi dan geomorfologi di sekitar lokasi penambangan baik secara fisik pada alamnya itu sendiri maupun bagi masyarakat sekitar yang bisa disebabkan oleh adanya aktivitas alat berat dan lain-lain.

Untuk melihat seberapa besar kontribusi yang mampu diberikan oleh industri pertambangan bahan galian batuan terhadap pendapatan asli daerah yang langsung dirasakan oleh masyarakat, perlu dilakukan kajian yang lebih mendalam terutama dalam pengembangan ekonomi makro dan mikronya. Hal ini perlu dilakukan, karena untuk pihak pemerintah daerah tidak pernah dan sama sekali tidak memperhitungkan masalah tersebut.

Kebijakan Otonomi Daerah memberikan peluang bagi Pemerintah dan Masyarakat Daerah untuk berkembang secara mandiri. Potensi ekonomi dan keuangan perlu digali dan diolah. Hal lain yang terkena dampak akibat adanya aktivitas pertambangan yaitu program pengembangan wilayah baik secara makro maupun mikro

yang direncanakan oleh pemerintahan daerah. Dalam merencanakan pengembangan wilayah tersebut, perlu ditunjang dengan tingkat ekonomi yang stabil dan surplus, yang berkaitan dengan masalah pendapatan asli daerah kabupaten.

Industri pertambangan, sampai saat ini merupakan salah satu industri yang memberikan kontribusi dalam PAD suatu kabupaten termasuk Kabupaten Bandung, meskipun apabila dibandingkan terhadap industri lain pajak yang diberikan dari industri pertambangan relatif kecil. Namun yang terjadi sekarang ini, pihak pemerintah daerah hanya melihat satu sisi yaitu dilihat dari besar kecilnya kontribusi yang didapatkan oleh pemerintah daerah.

1.1 Perumusan Masalah

Kebijakan otonomi Daerah memberikan peluang bagi Pemerintah dan Masyarakat Daerah untuk berkembang secara mandiri. Potensi ekonomi dan keuangan perlu digali dan diolah. Dengan demikian maksud dari penelitian ini adalah untuk:

1. Mengidentifikasi potensi ekonomi Daerah dan Penerimaan Asli Daerah Sendiri (PADS) terutama yang bersumber dari Pajak, Retribusi dan PBB.
2. Mengidentifikasi kesiapan Pemerintah Daerah dalam rangka pengembangan investasi pada sektor ekonomi produktif yang menaikkan penghasilan Daerah (*revenue generate*).

1.2 Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mengidentifikasi potensi ekonomi daerah dan penerimaan asli daerah sendiri (PADS) terutama yang bersumber dari pajak, retribusi dan PBB.
2. Mengidentifikasi kesiapan pemerintah daerah dalam rangka pengembangan investasi pada sektor ekonomi produktif yang menaikkan penghasilan daerah atau *revenue generate*

2. Metodologi

Strategi untuk menganalisis tingkat pendapatan langsung dan terealisasi di lingkungan masyarakat penambang khusus bahan galian batuan dilakukan dengan mengumpulkan data primer dan data sekunder dengan cara penyampaian kuisisioner kepada responden. Kemudian wawancara dilakukan dengan pihak-pihak yang berkompeten pada instansi terkait di Pemda. Sedangkan studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data skunder serta informasi mengenai kebijakan dan peraturan otonomi daerah dan kebijakan desentralisasi fiskal yang berlaku sekarang.

Selanjutnya data dan informasi dimaksud diolah dan ditabulasi untuk kemudian dilakukan analisa secara deskriptif dan kuantitatif disesuaikan dengan keperluan dan konteks permasalahan yang ditemukan.

Beberapa sektor ekonomi yang berpotensi untuk dikembangkan seperti pertanian, perkebunan, perdagangan dan industri merupakan variabel yang digunakan dalam menganalisa permasalahan.

a. Site Visit Lokasi Pertambangan

Kunjungan perusahaan ini dilakukan untuk mengetahui secara langsung kondisi perusahaan baik secara fisik maupun secara aktivitas, jumlah keseluruhan perusahaan yang di Wilayah Kab. Bandung Barat yaitu ± 70 perusahaan, namun hasil koordinasi dengan SKPD terkait bidang pertambangan maka hanya 17 perusahaan yang dapat dijadikan acuan untuk kegiatan penelitian yang tersebar di Kec. Padalarang dan Kec.

Batujajar, namun ada 1 perusahaan di luar kawasan kecamatan tersebut yang dijadikan sampel pembandingan.

b. Diskusi dengan Stakeholder

Diskusi dilakukan dengan pihak stakeholder khususnya perusahaan untuk menggali informasi berkaitan dengan aspek ekonomi khususnya pajak perusahaan dan program atau kegiatan didalam pengembangan ekonomi lokal di sekitar lokasi pertambangan.

c. Penyebaran Kuesioner

Penyebaran kuesioner dilakukan terhadap 17 perusahaan yang telah direkomendasikan, setiap 1 perusahaan diberikan 1 kuesioner yang diisi oleh pihak perusahaan dan 4 – 5 orang pegawai untuk semua posisi yang berbeda.

d. Literatur dari SKPD Terkait

Literatur berkaitan dengan kegiatan penelitian yang dilakukan yaitu berupa dokumen penelitian pendahuluan yang dilakukan tahun 2007, serta data-data lain yang dikeluarkan oleh SKPD terkait khususnya tentang pajak dan retribusi.

3. Pembahasan

Secara sektoral yang mempunyai peluang besar dikembangkan dan diharapkan dapat mendukung kegiatan ekonomi daerah maka dapat digunakan teknik analisis kuesion lokasi serta shift and share.

Hasil kegiatan menunjukkan, rata-rata pengembangan ekonomi lokal di sekitar Wilayah Pertambangan Pasir dan Batuan berkembang cukup signifikan, misalkan ; tumbuhnya warung-warung kecil, industri skala kecil dan menengah juga berkembang (warung makan), dan lain sebagainya.

Berdasarkan 17 lokasi pertambangan dari 70 perusahaan pertambangan di Kab. Bandung Barat, dimana ke-17 perusahaan tersebut bagian dari kegiatan survey penelitian, memberikan gambaran bahwa rata-rata 83% pemilik dan pengembang ekonomi lokal yaitu penduduk asli wilayah lokasi pertambangan dengan besaran perputaran nilai uang dalam 1 minggu sebesar Rp. 6.000.000 s.d Rp. 10.000.000 untuk setiap warungnya, dengan margin pendapatan (keuntungan) per minggu yaitu Rp. 500.000 s.d Rp. 1.650.000.

Penghasilan tersebut menunjukkan sedang hingga sangat cukup, karena di luar dari penghasilan kepala keluarga yang menjadi pekerja di lokasi pertambangan. Penghasilan kepala keluarga yang menjadi pekerja tambang berkisar antara Rp. 2.000.000 s.d Rp. 4.000.000, ada juga yang mempunyai penghasilan lebih dari Rp. 4.000.000, ada nilai yang cukup signifikan yang didapatkan karena setiap bulannya mendapatkan penghasilan yang konstan, sekitar 15,67% memberikan komentar dimana penghasilan tersebut lebih besar sedikit dibandingkan menggarap lahan, bertani dan berdagang, namun penghasilannya tidak konstan setiap bulan tergantung dari keadaan. Namun ada keuntungan lain yang didapatkan dengan bekerja diperusahaan pertambangan, dimana jaminan kesehatan tidak hanya untuk kepala keluarga yang bekerja, namun bisa dimanfaatkan bagi anggota keluarga maksimal 3 orang anak hingga umur 17 tahun dan 1 orang istri.

Hal lain yang perlu diperhatikan yaitu, besaran nilai yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk pengembangan masyarakat sekitar lokasi relatif besar dengan kisaran antara Rp. 5.000.000 hingga Rp. 15.000.000 (baik berupa barang maupun uang) setiap bulannya, di wilayah lain yang masih merupakan bagian Kab. Bandung Barat, besaran nilai yang didapatkan untuk pengembangan masyarakat local yaitu hingga lebih dari Rp.

50.000.000 setiap bulannya yang dikelola oleh pihak pemerintahan setempat (desa dengan RW dan RT) yang akan digunakan untuk kepentingan masyarakat.

Apabila kita berikan gambaran berdasarkan RPJMD Kab. Bandung Barat 2013 – 2018 jelas terlihat kinerja perekonomian Kabupaten Bandung Barat tahun 2012 secara riil ditunjukkan oleh laju pertumbuhan ekonomi (LPE) atas dasar harga konstan tahun 2000, yang mengalami pertumbuhan sebesar 6,04 persen. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, maka terjadi percepatan atau peningkatan 0,29 poin dimana tahun 2011 mencapai 5,75 persen.

Laju pertumbuhan pada sektor pertambangan meskipun masih kecil memberikan kontribusi yaitu sebesar 4.97 (2010), 8.12 (2011), dan 3.12 (2012), namun mempunyai peluang besar untuk dikembangkan melalui pajak dan retribusi yang lebih jelas targetnya melalui koordinasi dan kerjasama dengan SKPD Teknis seperti Dinas Binamarga Sumberdaya Air dan Pertambangan, sehingga mampu dijangar secara riil mengenai jumlah produksi dan jumlah penjualannya.

Tabel 1.
Laju Pertumbuhan PDRB Kab. Bandung Barat, atas Dasar harga Konstan Tahun 2011-2012 (Persen).

LAPANGAN USAHA [1]	2010 [2]	2011 [3]	2012* [4]
I. Primer	5,29	2,39	4,78
1. Pertanian	5,30	2,14	4,86
2. Pertambangan dan Penggalian	4,97	8,12	3,12
II. Sekunder	4,46	5,99	5,43
3. Industri	3,88	5,68	4,84
4. Listrik, Gas dan Air	7,19	6,04	7,02
5. Bangunan	7,27	11,66	11,25
III. Tersier	7,15	6,57	7,42
6. Perdagangan/Hotel/Restoran	7,82	7,57	9,14
7. Pengangkutan/Telekomunikasi	7,14	4,00	4,64
8. Keuangan/Persewaan/jasa Perusahaan	7,82	6,35	5,92
9. Jasa-jasa	4,76	5,8	5,05
PDRB	5,47	5,75	6,04

Sumber: Indikator Makro Ekonomi, BPS Kab. Bandung Barat 2012

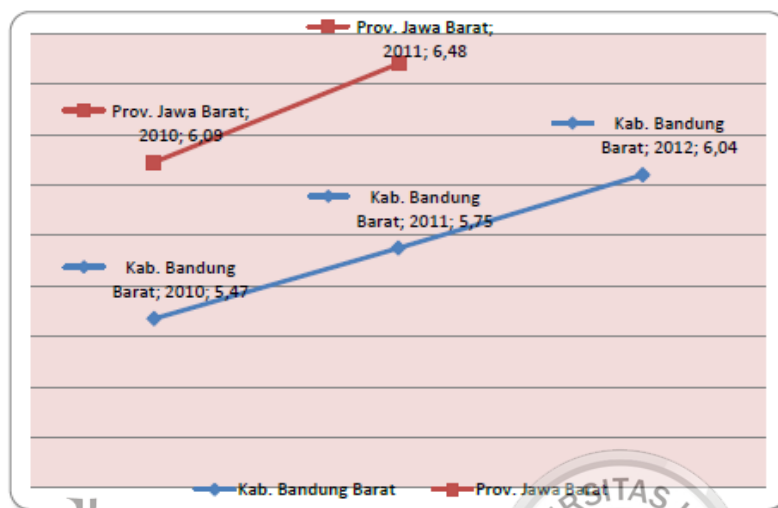
Menurut hasil perhitungan LQ dari PDRB Tahun 2011 maupun 2012, menunjukkan bahwa Sektor Industri Pengolahan merupakan sektor yang menonjol perannya (dalam kontribusi) dibandingkan wilayah yang lebih luas. Hal ini ditunjukkan dengan nilai LQ >1 untuk sektor tersebut yang sangat potensi dikembangkan lagi.

Tabel 2.
Distribusi Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Bandung Barat, Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2010-2012 (Persen)

LAPANGAN USAHA [1]	2010 [3]	2011 [4]	2012* [5]
I. Primer	12,70	12,32	12,26
1. Pertanian	12,30	11,92	11,87
2. Pertambangan dan Penggalian	0,40	0,4	0,39
II. Sekunder	51,31	51,17	50,85
3. Industri	42,36	42,14	41,76
4. Listrik, Gas dan Air	6,45	6,39	6,27
5. Bangunan	2,49	2,65	2,82
III. Tersier	36	36,51	36,88
6. Perdagangan/Hotel/ Restoran	20,04	20,44	21,22
7. Pengangkutan/ Telekomunikasi	6,65	6,52	6,13
8. Keuangan/Persewaan/ jasa Perusahaan	2,72	2,76	2,74
9. Jasa-jasa	6,59	6,79	6,79
PDRB	100,00	100,00	100,00

Sumber: Indikator Makro Ekonomi, BPS Kab. Bandung Barat Tahun 2012

Berdasarkan hasil perhitungan pergeseran keseluruhan (total shift) di Kab. Bandung Barat menunjukkan bahwa perkembangan hampir seluruh sektor berkembang relatif lambat dibandingkan dengan rata-rata perkembangan ekonomi Provinsi Jawa Barat, terkecuali sektor industri pengolahan.



Sumber : BPS, Indikator Makro Ekonomi Tahun 2012

Gambar 1. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bandung Barat dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2010-2012 (Persen)

Hasil perhitungan perbedaan pergeseran (share relatif) menunjukkan bahwa laju pertumbuhan pada sektor-sektor pertanian, pertambangan dan penggalian, listrik, gas dan air bersih, perdagangan, hotel dan restoran, pengangkutan dan komunikasi, keuangan, persewaan dan jasa perusahaan di kabupaten ini perkembangannya lebih cepat dibandingkan dengan tingkat wilayah lebih luas.

Berkaitan dengan ketenagakerjaan di seluruh perusahaan, khususnya tenaga kerja lokal hampir 95% yang terlibat merupakan masyarakat lokal dengan berbagai posisi dalam bekerja, sehingga apabila dengan nilai pendapatan yang diterima oleh setiap pekerja (masyarakat lokal) yang bekerja di perusahaan, ditambahkan dengan perputaran dan keuntungan ekonomi yang dinikmati serta nilai angka yang diberikan oleh perusahaan meliputi barang dan uang sebagai bagian untuk pengembangan wilayah pertambangan maka cukup besar.

4. Kesimpulan dan Saran

- 1) Hasil identifikasi menunjukkan potensi ekonomi Daerah dan Penerimaan Asli Daerah Sendiri (PADS) terutama yang bersumber dari Pajak, Retribusi sektor Pertambangan masih relative kecil.
- 2) Kesiapan Pemerintah Daerah dalam rangka pengembangan investasi pada sektor ekonomi produktif yang menaikkan penghasilan Daerah (*revenue generate*) mempunyai peluang yang cukup besar.
- 3) Aktivitas pertambangan belum memberikan kontribusi yang cukup berarti bagi perekonomian wilayah secara umum, namun secara local aktivitas pertambangan sangat dirasakan oleh masyarakat

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada LPPM Universitas Islam Bandung sebagai institusi yang memfasilitasi tim peneliti untuk bisa berkompetisi didalam mendapatkan Dana Hibah Bersaing dari DP2M - DIKTI, dan Terima Kasih kepada DP2M - DIKTI, yang telah membiaya kegiatan Penelitian Hibah Bersaing, tidak lupa kami sampaikan terima kasih kepada pihak Pemerintahan Daerah Kab. Bandung Barat khususnya Dinas Sumber Daya Air dan Pertambangan yang telah memfasilitasi kegiatan ini dengan pihak perusahaan dan bantuan di lapangan.

Daftar Pustaka

Bachrul Elmi, 2002, *STUDI PENINGKATAN EKONOMI DAN KEUANGAN, KABUPATEN LAMPUNG UTARA*, Tahun 2002.

Machfud Sidik, 2002, *Kebijakan Desentralisasi Fiskal di Indonesia*, Dep. Keuangan RI.

Mulia P. Nasution, 2002, *Reformasi Manajemen Keuangan*, Dep. Keuangan RI.

Osborne David, Gaebler Ted, 1993, *Reinventing Government, How The Entrepreneurial Spirit Transforming The Public Sector*, New York, Penguin Books, Inc. USA.

P.P No. 105 Tahun 2000, *Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah*.

RI UU No. 32 Tahun 2004 *Tentang Otonomi Daerah*.

The World Bank, 2000, *Indonesia Accelerating Recovery in Uncertain Times*, 1818, H. Street, NY.

